



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# MKT+

## Kaleidoskop 2022

MKT+ (Media Keuangan) merupakan media resmi dibawah pengawasan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

## Edisi Khusus

Majalah Media Keuangan  
Edisi Khusus Kaleidoskop 2022  
ISSN 1907-6320





### Cover Story

Kami mengambil foto piringan hitam dengan gaya klasik. Piringan hitam menggambarkan rekaman dan memori yang terkandung selama tahun 2021.

### Foto Sampul

Resha Aditya

### Media Keuangan

adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

-----  
**Diterbitkan oleh:** Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan | **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati | **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara | **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi  
**Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Rahayu Puspasari | **Pemimpin Redaksi:** Kabag Manajemen Publikasi, Rahmat Widiana | **Redaktur Pelaksana:** Kasubbag Publikasi Cetak Yani Kurnia | **Dewan Redaksi:** Ferry Gunawan, Dianita Suliasuti, Titi Susanti, Budi Sulistyio, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Alit Ayu Meinarsari, Teguh Warsito, Hadi Surono, Budi Prayitno, Budi Sulistiyol | **Tim Redaksi:** Reni Saptati DII, Rita Nurhayati, Dara Haspramudilla, Dimach Oktaviansyah Karunia Putra, Al Wirananda, CSI Purwowidhu Widayanti, Rostamaji, Andi Abdurrochim, Arif Miftahur Rozaq, Luqman Hakim, Muhammad Irfan, Indah Sandary Putri Jayus, Kurnia Fitri Anidya, Buana Budianto Putri, Mahardika Argha Mariska, Kurnia Fitri Anidya, Muhamad Ripurio, Berliana, Ni Made Ary Ramayanti, Intan Nur Shabrina | **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Resha Aditya Pratama, Andi Al Hakim, Andi Abdurrochim | **Desain Grafis dan Layout:** Venggi Obdi Ovisa, Ditto Novenska, Muhammad Fithrah

### Alamat Redaksi

Gedung Djuanda 1 Lantai 9,  
Jl. Dr. Wahidin Raya No.1, Jakarta  
Telp (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330  
E-mail [mediakeuangan@kemenkeu.go.id](mailto:mediakeuangan@kemenkeu.go.id)

### Ikuti Kami

 [www.mediakeuangan.kemenkeu.go.id](http://www.mediakeuangan.kemenkeu.go.id)  
 [majalahmediakeuangan](https://www.instagram.com/majalahmediakeuangan)  
 Media Keuangan Podcast  
 Kementerian Keuangan RI/Playlist MK

# Daftar Isi

## **DARI LAPANGAN BANTENG**

- 03 Antara Harapan dan Kewaspadaan

## **PHOTOSTORY**

- 08 Sudut Jakarta

## **PHOTOSTORY**

- 06 Menuju Babak Baru

## **LAPORAN UTAMA**

- 08 Ragam Jurus Tangani Pandemi
- 12 Jaga Ekonomi, Jaga Bumi
- 16 Merancang APBN 2022 Nan Responsif, Antisipatif, dan Fleksibel
- 22 UU HPP: Tonggak Sejarah Baru Reformasi Perpajakan
- 28 Mengolah Potensi Ekonomi Syariah
- 32 Serba-Serbi Presidensi G20 Indonesia 2022

## **POTRET KANTOR**

- 44 Perkara-perkara Nyata yang Kerap Terlupa
- 46 Pak Maman Jojo





**PPID Kemenkeu dalam genggaman**

Unduh sekarang via Google Store dan App Store

Dari Lapangan  
Banteng

# Antara Harapan dan Kewaspadaan

Ibarat melalui sebuah perjalanan dengan mengendarai kereta, kita merasa sudah sampai di tujuan ketika kereta mulai berjalan lambat. Para penumpang pun mulai sibuk menengok ke jendela, ingin memastikan sudah sampai di mana. Biasanya, sembari sibuk mengemas barang, mereka penuh harap bahwa tujuan akhirnya telah tiba. Demikian halnya dengan perjalanan sepanjang tahun 2021. Layaknya sebuah perjalanan gerbong kereta, akhir 2021 menjadi pengharapan bahwa pandemi yang hampir dua tahun melanda dunia sudah akan berakhir.

Namun sayangnya, perjalanan pandemi nampaknya masih berlanjut. Meski sinyal-sinyal baik terus muncul, kita mesti sedikit lagi bersabar. Varian baru Omicron masih terus membayangi hingga waktu yang belum dapat kita prediksi. Kabar baiknya, ketidakpastian ini diimbangi dengan upaya pemerintah yang konsisten melakukan penanganan pandemi melalui APBN.

Kinerja dan ikhtiar-ikhtiar baik yang terus dilakukan pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat telah membuktikan bahwa Indonesia telah mampu melewati tahun 2021 dengan pengendalian pandemi yang cukup baik.

Hantaman Covid-19 varian Delta dengan puncak di bulan Juli 2021, kini telah cukup stabil terkendali bahkan dengan kasus harian dan kematian di penghujung tahun terendah sejak April 2020.

Pengendalian pandemi sepanjang 2021 diupayakan pemerintah melalui kinerja APBN Kita yang telah bekerja keras melalui berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Bahkan, tahun kedua pandemi tak menyurutkan agenda-agenda prioritas pemerintah di antaranya penetapan APBN 2022, pengembangan ekonomi hijau, ekonomi syariah, dan reformasi struktural melalui Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) hingga penyelenggaraan perhelatan bergengsi Presidensi G20.

Pandemi memang masih seperti misteri kapan akan benar-benar berakhir. Seperti kutipan dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye “Begitulah kehidupan. Ada yang tahu, ada pula yang tidak tahu”. Yang pasti, pemerintah senantiasa waspada dan akan terus menerus bahu membahu bersama semua pihak agar pandemi dapat terkendali dan tertangani dengan baik. Selamat menyambut tahun baru 2022 dengan pengharapan!

photostory

# Sudut Jakarta



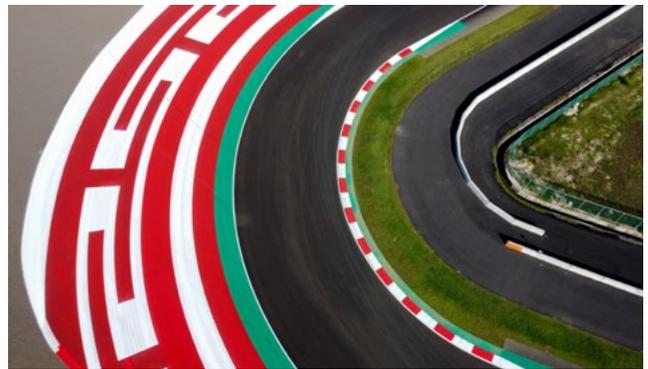
Menelusuri sudut-sudut kota Jakarta dan mengabadikannya lewat kamera tua yang secara ajaib masih dapat menangkap gambar dengan hasil yang prima. Dengan medium roll film yang hanya memiliki kemampuan merekam 36 memori, setiap pengambilan gambar menjadi momen yang penuh perhitungan dan kehati-hatian.



photostory

# Menuju Babak Baru





Tahun 2021 Indonesia memulai babak baru dengan kembali memiliki sirkuit kelas dunia. Presiden Joko Widodo meresmikan Sirkuit Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat 12 November 2021. Sirkuit ini memiliki panjang lintasan 4,31 km dengan 17 tikungan. Lintasan adu balap ini rencananya akan menjadi tuan rumah ajang balap MotoGP musim 2022.

Laporan Utama

Oleh: Dara Haspramudilla

# Ragam Jurus Tangani Pandemi



◀ Dalam menangani pandemi, pemerintah mengeluarkan berbagai strategi dan langkah nyata untuk memulihkan baik kesehatan maupun ekonomi. Di tahun 2021, anggaran sebesar Rp744,77 triliun dialokasikan untuk klaster kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, dukungan UMKM dan korporasi, serta insentif usaha.

## Pemulihan kesehatan jadi prioritas

Kesehatan tentu menjadi fokus utama, maka anggaran kesehatan dalam PEN dialokasikan sebesar RP214,96 triliun. Anggaran ini adalah yang tertinggi dari klaster lainnya dalam PEN. Anggaran ini dimanfaatkan untuk pengadaan vaksin sebanyak 304,39 juta dosis, biaya perawatan untuk 784,96 ribu pasien, insentif bagi 1,42 juta nakes pusat dan santunan kematian untuk 571 nakes, RS darurat Asrama Haji dan Pademangan, pemberian paket obat untuk masyarakat, dan bantuan iuran JKN untuk 34,71 juta orang.

Dalam menangani sisi kesehatan pada penanganan pandemi, pemerintah juga mengoptimalkan peran dari Badan Layanan Umum Kesehatan (BLU Kesehatan). Selama pandemi, BLU Kesehatan tidak hanya dituntut memberikan pengobatan dan perawatan yang maksimal bagi pasien Covid-19, tetapi juga memberikan edukasi masyarakat untuk mencegah penyebaran virus.

Selain itu, BLU Kesehatan juga berkontribusi dalam pemulihan ekonomi. Misalnya, Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta yang menggerakkan ekonomi sektor riil melalui percepatan pengadaan dari alokasi bagian anggaran bendahara umum negara sebesar Rp245 miliar yang selesai dalam waktu 50 hari.

Namun, ruang perbaikan masih ada dalam mengoptimalkan BLU Kesehatan dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Prof. dr. Hasbullah Thabrany, Chairman InaHEA mengatakan perlu adanya penguatan dari sisi sumber daya manusia, tata kelola, dan anggaran. Selain penguatan internal, sinergi BLU Kesehatan dengan instansi lain juga perlu dieratkan. Contohnya, penguatan kesamaan persepsi antara BLU Kesehatan dengan inspektorat daerah, BPK, dan BPKP.

## Jaring Perlindungan Sosial

Program perlindungan sosial menjadi sekoci bagi masyarakat yang terdampak pandemi agar daya beli mereka terjaga dan juga menahan laju kemiskinan. Tahun 2021, alokasi anggaran program PEN untuk perlintos adalah sebesar Rp186,64 triliun. Per 17 Desember 2021, anggaran ini sudah diserap sebesar Rp161,17 triliun atau 86,4% dari pagu yang ada.

Pemanfaatan anggaran perlintos digunakan untuk berbagai program diantaranya Program Keluarga Harapan (10 juta KPM), Kartu Sembako (18 juta KPM), Bantuan Sosial Tunai (9,99 juta KPM), BLT Desa (5,62 juta KPM), Kartu Pra Kerja (5,96

juta penerima), Bantuan Kuota Internet (66,6 juta penerima), dan Subsidi Listrik (32,6 juta penerima).

Melalui berbagai program perlintos tersebut, ekonomi Indonesia tidak terjatuh terlalu dalam karena pertumbuhan konsumsi rumah tangga terjaga. Hal ini disebabkan hampir 60 persen pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh belanja masyarakat. Lebih dari itu, Indonesia pun berhasil menahan tingkat kemiskinan sehingga tidak mencapai proyeksi Bank Dunia yang mencapai 11,2 persen.

Namun, masih ada masalah klasik yang terus mengusik implementasi program perlintos yakni pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dari pengalaman Pemprov Jawa Barat, data awal penerima bantuan yang diterima masih harus difilter sebanyak 23 kali.

“Ini untuk melihat apakah calon penerima masih hidup, apakah masih memenuhi syarat dan seterusnya,” terang Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Abra Talattov, ekonom INDEF turut mengamini, menurutnya Tahun 2021 harus jadi tahun penting pemerintah bisa mengharmonisasi DTKS.

“Apalagi pasti DTKS ini mengalami perubahan sebab adanya pandemi ini pasti ada sebagian kelompok rumah tangga yang masuk karena pendapatan menurun atau mendapat pemutusan hubungan kerja,” tambahnya.

## Dukung Tulang Punggung Ekonomi Nasional

UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional memegang peranan luar biasa penting dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Namun, kondisi pandemi yang tak menentu menjadi situasi yang sulit bagi UMKM. Maka, anggaran dukungan untuk UMKM dan Korporasi pun dialokasikan sebesar Rp162,40 triliun dalam PEN 2021. Ini merupakan upaya pemerintah untuk membantu pelaku UMKM agar dapat bertahan dan segera pulih.

Dukungan untuk UMKM ini diantaranya dialokasikan untuk Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk 12,8 juta usaha, IJP untuk 2,45 juta UMKM dan 49 korporasi, penempatan dana bank dengan total penyaluran kredit Rp457,51 T kepada 5,49 juta debitur, subsidi bunga KUR untuk 7,35 juta debitur dan Non-KUR untuk 6,76 juta debitur, PMN untuk HK, Pelindo III, KIWI, ITDC, LPI sebesar Rp23,86 T, dan bantuan PKL untuk 1 juta usaha.

Harapannya, melalui dukungan anggaran ini, UMKM dan Korporasi dapat terus produktif



menjalankan usaha dan mendapat penghasilan meski di tengah kondisi yang tidak mudah.

### **Insentif Usaha Bagi Pelaku Usaha**

Selain alokasi anggaran di bidang kesehatan dan perlindungan sosial, pemerintah juga memberikan ragam insentif dunia usaha yang dimanfaatkan oleh para pelaku usaha yang terdampak pendapatannya akibat pandemi. Insentif ini diberikan baik dengan melonggarkan likuiditas usaha maupun memberikan relaksasi dari sisi perpajakan.

Hingga 17 Desember, realisasi PEN pada klaster insentif dunia usaha telah mencapai Rp63,16 triliun dari pagu Rp62,83 triliun atau terealisasi sebesar 100,5%. Sebagian besar dari insentif usaha ini dimanfaatkan oleh insentif perpajakan. PPh 21 DTP telah dimanfaatkan oleh 87.086 pemberi kerja, PPh Final UMKM DTP dimanfaatkan oleh 134.922 UMKM, Pembebasan PPh 22 Impor untuk 9.601 WP, Pengurangan Angsuran PPh 25 untuk 58.057 WP, Pengembalian Pendahuluan PPN

untuk 2.778 WP, Penurunan Tarif PPh Badan manfaat untuk seluruh WP, PPN DTP Properti untuk 941 Penjual, PPnBM Mobil untuk 6 Penjual, PPN DN sewa Outlet untuk 885 WP, serta BM DTP untuk nilai impor Rp4,51 T.

Realisasi insentif dunia usaha yang sudah melebihi target ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi mulai bergerak. Adanya klaim atas insentif-insentif pajak yang diberikan pemerintah memperlihatkan adanya transaksi ekonomi. Hal ini juga ditopang oleh membaiknya situasi pandemi di tanah air sehingga upaya pemerintah untuk membangkitkan dunia usaha dengan menstimulasi daya beli masyarakat berjalan optimal.

Lebih dari itu, pemberian insentif ini juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, insentif PPnBM DTP Mobil yang berhasil menggenjot penjualan mobil sehingga industri otomotif sebagai lokomotif industri yang memiliki multiplier effect besar bagi perekonomian, berangsur pulih. Pemulihan dunia usaha pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

## Menyasar Sektor Pariwisata, ICT, dan Ketahanan Pangan

Selain empat klaster tersebut, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk program prioritas sektoral, K/L dan pemerintah daerah. Hingga 17 Desember, realisasi anggaran program prioritas telah mencapai 74,2% atau sebesar Rp87,47 triliun dari pagu sebesar Rp117,94 triliun. Anggaran ini dimanfaatkan untuk beberapa program baik yang menyasar sektor padat karya, pariwisata, ICT, ketahanan pangan maupun pinjaman daerah.

Di sektor Padat Karya K/L programnya melibatkan 1,61 juta tenaga kerja. Untuk pariwisata digunakan untuk sertifikasi CHSE serta akomodasi nakes dalam rangka peningkatan industri perhotelan.

Di bidang ketahanan pangan, alokasi anggaran digunakan untuk pembangunan bendungan dan food estate. Selain itu, pemerintah juga fokus dalam melakukan pemutakhiran DTKS melalui program ICT. Tidak hanya itu, melalui PT. SMI, fasilitas pinjaman daerah juga digelontorkan sebesar Rp10 triliun.

## Program PEN Berlanjut di 2022

Dengan adanya program PEN selama pandemi dinilai telah membantu menanggulangi dampak pandemi baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Untuk itu, pemerintah akan melanjutkan program PEN pada 2022 dengan anggaran sebesar Rp414 triliun. Fokus dari PEN 2022 masih dialokasikan untuk sektor kesehatan dengan anggaran Rp117,9 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,8 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi Rp141,4 triliun. Namun demikian, untuk anggaran kesehatan dan perlindungan masyarakat masih akan terus dilakukan penyesuaian dengan melihat perkembangan penanganan Covid-19.

Pengendalian pandemi Covid-19 diharapkan dapat terus terjaga. Pemerintah terus menghimbau masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan meski sudah mendapatkan vaksin sebanyak dua kali. Harapannya, dengan situasi pandemi yang terkendali, momentum pemulihan ekonomi masih akan terus berlanjut di 2022.

# Alokasi Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN 2021)

## PEN Sektor Kesehatan

Alokasi 214,96 T



Realisasi 163,4 T



## PEN Sektor Perlindungan Sosial

Alokasi 186,64 T



Realisasi 162,97 T



## PEN Sektor Program Prioritas

Alokasi 117,94 T



Realisasi 162,97 T



## PEN Sektor UMKM dan Korporasi

Alokasi 162,40 T



Realisasi 75,84 T



## PEN Sektor Insentif Usaha

Alokasi 62,83 T



Realisasi 63,16 T



(Sumber: [www.pen.kemenkeugo.id](http://www.pen.kemenkeugo.id) data per 24 Des 2021)

Laporan Utama

Oleh: Resha Aditya P.

# Jaga Ekonomi, Jaga Bumi

*COVID-19 telah membuat dunia pontang panting. Namun sejatinya terdapat isu yang tidak kalah penting yaitu perubahan iklim atau climate change. Intensitas bencana hidrometeorologi mengalami peningkatan dalam satu dekade terakhir. Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim menjadi penyebabnya.*

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan isu perubahan iklim tetap akan menjadi topik yang akan dibicarakan dalam pertemuan G20 yang akan dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2022 mendatang. “Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, baik di Roma, di Glasgow, dan di dalam berbagai forum, Bapak Presiden telah menyampaikan komitmen Indonesia untuk menurunkan CO2 dunia sehingga kita terhindar dari malapetaka perubahan iklim,” ujar Menkeu.

Selain itu, terpilihnya Sri Mulyani sebagai Co-Chair dari the Coalition of Finance Ministers for Climate Action periode 2021-2023 makin memperkuat peran Indonesia dalam upaya penanggulangan perubahan iklim.

### **Keseimbangan lingkungan dan ekonomi**

Sebagai negara kepulauan sekaligus kontributor emisi global, Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan. Proyeksi Bappenas memperlihatkan Indonesia di masa depan hingga 2045 akan mengalami cuaca ekstrim baik basah maupun kering. Kondisi ini juga akan berimplikasi ke sektor ekonomi.

Direktur Lingkungan Hidup Bappenas Medrilzam menuturkan bahwa isu perubahan iklim bukan hanya isu lingkungan tetapi persoalan pembangunan yang berdampak pada sektor keuangan, ekonomi, pembiayaan dan sebagainya. “Untuk itulah kami menggagas pembangunan rendah karbon sebagai program pembangunan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 untuk memulai perubahan signifikan. Kita berharap ada keseimbangan antara isu lingkungan dan ekonomi serta meminimalkan trade-off antara keduanya,” terang Medrilzam.

Sejak tiga dekade lalu, aksi global telah dimulai melalui pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Pertemuan tahunan UNFCCC tersebut awalnya dihadiri oleh para menteri di bidang lingkungan hidup saja dan belum melibatkan menteri di bidang lainnya.

Menkeu menceritakan saat Indonesia menjadi tuan rumah UNFCCC di Bali pada 2008, dunia baru mulai tersadar bahwa banyak sekali kebijakan pengendalian perubahan iklim berhubungan dengan aspek keuangan. “Saat itu, mulai dimasukkan pembahasan mengenai perubahan iklim di antara para Menteri Keuangan. Itu

belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, Indonesia diminta untuk menjadi tuan rumah pertama bagi para Menteri Keuangan dan Menteri Pembangunan untuk bisa berkumpul. Semenjak saat itu ada tradisi agar para Menteri Keuangan terlibat,” ungkap Sri Mulyani.

### **Anggaran perubahan iklim**

Pada RPJMN 2020-2024, terdapat tiga program prioritas terkait aspek perubahan iklim. Pertama, peningkatan kualitas lingkungan dengan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai 73,25-75,25 pada 2024. Kedua, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim dengan target pengurangan rasio kerugian ekonomi akibat dampak bencana dan bahaya iklim terhadap PDB sebesar 0,21 persen pada 2024. Ketiga, pembangunan rendah karbon yang menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,3 persen pada 2024.

Untuk memenuhi komitmen dan target tersebut, peran APBN sangat vital sebagai instrumen fiskal dalam mendorong proses transformasi ekonomi hijau. Berdasarkan Second Biennial Update Report (2nd BUR) tahun 2018, Indonesia diperkirakan membutuhkan pendanaan untuk pengendalian perubahan iklim sebesar Rp3.461 triliun hingga tahun 2030. “Berarti per tahunnya saja setidaknya kita memerlukan Rp266,2 triliun. Dari hasil penandaan anggaran perubahan iklim atau Climate Budget Tagging sejak 2016 sampai dengan 2020, APBN hanya dapat memenuhi sekitar Rp86,7 triliun per tahunnya atau 34 persen dari kebutuhan tersebut,” jelas Sri Mulyani.

Anggaran perubahan iklim rata-rata mencapai 4,1 persen dari APBN. Selama lima tahun terakhir, 88,1 persen dari total anggaran perubahan iklim tersebut dibelanjakan dalam bentuk green infrastructure yang berfungsi sebagai roda penggerak perekonomian sekaligus modal utama transformasi ekonomi hijau di Indonesia. Belanja diarahkan untuk pembangunan infrastruktur Energi Baru dan Terbarukan (EBT), transportasi berkelanjutan, sistem pengelolaan sampah dan limbah yang efisien, pengembangan bibit pertanian rendah emisi, hingga rehabilitasi hutan dan lahan.

### **Mengendalikan lewat pajak karbon**

Pada 2016, Indonesia turut meratifikasi Paris Agreement yang di dalamnya terdapat komitmen Nationally Determined Contribution (NDC). Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia berkomitmen

untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dari Business as Usual (BaU) dengan usaha sendiri (sekitar 834 juta ton CO<sub>2</sub>) dan 41 persen (setara 1.185 juta ton CO<sub>2</sub>) dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Tonggak sejarah baru sebagai wujud komitmen kuat pemerintah kembali ditancapkan pada 7 Oktober 2021 lalu melalui pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU tersebut mengatur sederet kebijakan fiskal, salah satunya ialah pajak karbon sebagai instrumen pengendali perubahan iklim.

Sebagai negara emerging yang pertama kali menggerakkan pajak karbon, Moh. Faisal, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, menilai Indonesia telah mengambil langkah yang sangat berani. “Saya rasa ini langkah yang sangat berani bagi Indonesia karena dibandingkan dengan developing countries yang lainnya, Indonesia termasuk negara yang emisi karbonnya tinggi dan cenderung tidak green. Jadi ketika kita memulai ini, yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana kita bisa berkomitmen dan tidak hanya melihat pajak karbonnya, tetapi juga menitikberatkan pada pembangunan rendah karbonnya,” ucapnya.

Menurut Chrisnawan Anditya, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Pemanfaatan pajak karbon nantinya juga akan diberikan untuk pembiayaan menuju transisi energi ataupun pemanfaatan energi baru terbarukan serta dapat mendorong perubahan perilaku para pelaku ekonomi untuk beralih ke aktivitas ekonomi hijau. “Kebijakan pajak karbon ini juga dilaksanakan sebagai upaya dalam mengidentifikasi pencapaian energi yang lebih bersih. Pendanaan tersebut juga nantinya bisa digunakan untuk pengembangan energi bersih, EBT, ataupun sebagai instrumen untuk mitigasi emisi,” ujar Chrisnawan.

Menurut Faisal, konsekuensi penerapan pajak karbon yang berdampak terhadap perekonomian perlu menjadi perhatian. Saat ini, Indonesia sedang ingin mencapai pemulihan yang lebih cepat. Untuk itu, pajak karbon jangan sampai berdampak dan menahan pemulihan ekonomi kita khususnya terhadap sektor menengah dan kecil. Masyarakat menengah bawah merupakan yang paling rentan terhadap kenaikan harga dan cenderung sulit untuk pulih dari krisis dibanding konsumen kalangan menengah dan atas.

## Menuju emisi nol

“Dukungan Kementerian Keuangan terhadap aksi pengendalian perubahan iklim sangat kuat,” jelas Analis Kebijakan Madya Badan Kebijakan Fiskal, Noor Syaifudin. Selama ini, dukungan tersebut direfleksikan dalam sejumlah kebijakan fiskal yang telah dilaksanakan secara intensif. Dalam penjelasannya, Noor menyebut berbagai kebijakan fiskal tersebut sebagai tiga lengan yang dimiliki Kementerian Keuangan.

“Lengan pertama, kebijakan di sisi pendapatan negara. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah banyak memberikan banyak fasilitas perpajakan, antara lain tax holiday, tax allowance, fasilitas PPN, fasilitas pajak impor, serta fasilitas PPnBM untuk kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor ramah lingkungan diberikan pembebasan PPnBM sehingga tarifnya 0 persen,” terang Noor.

Lengan kedua, kebijakan di sisi belanja negara. Pemerintah mengembangkan kebijakan penandaan anggaran untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kebijakan ini merupakan terobosan untuk memobilisasi pendanaan dan meningkatkan kepedulian terhadap dampak perubahan iklim di Indonesia. Kebijakan ini sudah dimulai sejak 2016. Pada tahun 2020, sejumlah pemerintah daerah juga melakukan uji coba penandaan anggaran belanja untuk aktivitas hijau yang dikenal dengan regional climate budget tagging.

Terakhir, lengan ketiga Kementerian Keuangan dalam aksi pengendalian perubahan iklim ini berasal dari sisi pembiayaan. Sejak 2018, pemerintah menerbitkan green sukuk untuk membiayai transportasi berkelanjutan, mitigasi bencana, pengelolaan limbah, akses energi sumber terbarukan, dan efisiensi energi. “Inisiatif green sukuk ini sangat positif dan progresif dan masih terus dikembangkan hingga kini,” ujar Noor.

Lebih lanjut, Noor mengungkapkan Indonesia menargetkan untuk mencapai Net Zero Emission atau Emisi Nol Bersih pada tahun 2060 atau lebih awal. Untuk mencapai target tersebut, agenda reformasi dalam kebijakan fiskal untuk mempercepat investasi hijau telah dimulai dan terus dikawal.

Dalam upaya mencapai target ini, pemerintah telah mengesahkan regulasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dengan menerbitkan Perpres No 98/2021 yang mengatur skema karbon dan pajak karbon. Pasar karbon diharapkan mampu menjaga emisi di level tertentu melalui sistem perdagangan antarpelaku. Sementara

pajak karbon sifatnya menguatkan pasar karbon. Untuk tarif pajak karbon di tahap awal, pemerintah menetapkan Rp30/kilogram CO2 atau setara 2,1 dollar AS/ton CO2. Angka ini adalah nilai minimal yang nantinya akan terus dievaluasi dan disesuaikan secara berkala.

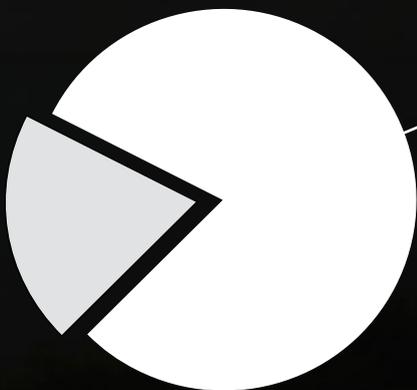
### **Komitmen kuat bersama**

Pengendalian perubahan iklim butuh dukungan dan komitmen kuat. Upaya ini tak dapat tuntas dalam waktu singkat. Kesungguhan dan keyakinan bersama untuk mampu melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan

iklim adalah kunci utama keberhasilan upaya global ini.

Menkeu, Sri Mulyani Indrawati, mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bersinergi dan bergandengan tangan dalam memerangi perubahan iklim. Mengendalikan dan menangani perubahan iklim adalah tanggung jawab semua penghuni bumi. Perubahan iklim adalah tentang masa depan bumi dan masa depan peradaban manusia “Ini sudah menjadi kolaborasi global, di mana tidak hanya Menteri lingkungan hidup, menteri keuangan, tetapi juga semua pihak dan semua negara,” pungkasnya.

## **Anggaran perubahan iklim rata-rata mencapai 4,1 persen dari APBN.**



Selama 5 tahun terakhir, 88,1 persen dari total anggaran tersebut dibelanjakan dalam bentuk green infrastruktur.

### **Belanja Infrastruktur:**

Pembangunan infrastruktur EBT,  
Transportasi berkelanjutan,  
Sistem pengelolaan sampah dan limbah yang efisien,  
Pengembangan bibit pertanian rendah emisi,

laporan utama

Teks: Reni Saptati D.I.

# Merancang APBN 2022 Nan Responsif, Antisipatif, dan Fleksibel

*Tiap tahun, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki agenda rutin menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2021, di tengah suasana pandemi yang masih menjadi ancaman dan tantangan bagi semua negara di dunia, agenda rutin tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya.*

Bukan perkara mudah merancang APBN 2022. Dinamika perekonomian global dan domestik masih dibayangi ketidakpastian tinggi akibat pandemi serta perkembangan varian baru COVID-19. Dalam kondisi yang penuh tekanan tersebut, pemerintah dan DPR harus mampu merancang kebijakan fiskal yang ekspansif tetapi terarah dan terukur. Hingga akhirnya, pada 30 September 2021, DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2022 menjadi Undang-Undang (UU) APBN 2022.

“Pemerintah memiliki optimisme yang sama dengan DPR untuk mengakselerasikan pemulihan ekonomi, kesejahteraan rakyat harus dipulihkan dan terus ditingkatkan pada tahun 2022. Optimisme tersebut sejalan dengan prospek perekonomian dan perdagangan dunia yang membaik meskipun kecepatan pemulihan antar negara berbeda, “ ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai wakil pemerintah dalam rapat paripurna DPR yang menjadi momen pengesahan APBN 2022.

### **Dukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural**

Setiap tahun tema APBN selalu berbeda. Untuk 2022, pemerintah dan DPR menyepakati tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Tema tersebut telah diusulkan jauh-jauh hari oleh pemerintah dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) kepada DPR yang disampaikan pada 20 Mei 2021. Dokumen inilah yang menjadi bahan Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN.

Pemilihan tema tersebut didasarkan pada pertimbangan pandemi COVID-19 yang belum usai dan berdampak besar terhadap perekonomian membuat pemulihan ekonomi masih menjadi fokus pada tahun depan. Upaya penanganan dampak kesehatan dan dampak sosial ekonomi dari pandemi telah dan akan terus dilakukan sampai pandemi berakhir.

Di sisi lain, tanpa adanya pandemi sekalipun, upaya reformasi struktural memang sudah perlu dijalankan segera di Indonesia. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menjelaskan, selama ini Indonesia selalu merespons krisis yang pernah dihadapinya dengan melakukan perbaikan-perbaikan mendasar.

Pada krisis ekonomi Asia tahun 1998, Indonesia melakukan reformasi menuju tatanan politik

baru, termasuk penerapan otonomi daerah. Pada krisis keuangan global tahun 2008, Indonesia memperbaiki tata kelola sektor keuangan, yakni melalui pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Respons serupa kembali diterapkan dalam krisis akibat pandemi COVID-19 dalam bentuk reformasi struktural. “Challenge yang kita dapatkan di perekonomian selalu direspons dengan perbaikan signifikan. Hal yang sama kita lakukan pada 2020 dan 2021. Bagaimana saat menghadapi krisis yang sebenarnya masih tinggi ketidakpastiannya ini, kita tetap menyadari bahwa apa yang dibutuhkan itu harus didorong dengan segera. Inilah mengapa pada tahun lalu 2020 terbit UU Cipta Kerja,” terang Febrio.

Febrio meyakini pandemi COVID-19 menjadi momentum tepat untuk memperkuat reformasi. Fokus reformasi struktural terbagi menjadi tiga titik, yakni peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, dan penguatan reformasi birokrasi.

Hasil kajian Kementerian Keuangan dan Asian Development Bank menunjukkan kemampuan adopsi teknologi dan inovasi berpotensi meningkatkan 0,55 persen pertumbuhan ekonomi per tahun selama dua dekade ke depan. Lalu, G20 Surveillance Note mencatat 0,5 persen PDB untuk belanja infrastruktur mampu mendorong 1 persen pertumbuhan ekonomi per tahun dalam empat tahun berikutnya. Sementara itu, reformasi birokrasi pemerintah pusat dan daerah akan mendorong iklim usaha yang kondusif.

Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah Redjalum sependapat reformasi struktural jangka menengah-panjang harus dilakukan untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dan memanfaatkan sumber daya. Namun, ia juga mengingatkan perlunya road map yang jelas agar reformasi struktural tidak menjadi jargon semata.

“Kita perlu punya rujukan, yang kita maksud reformasi struktural itu seperti apa, akan kita lakukan berapa lama, dengan cara bagaimana, dan siapa saja yang akan terlibat di dalam reformasi struktural tersebut,” ujar Piter.

### **Konsolidasi fiskal**

Sebagai periode eksepsional terakhir defisit dapat melebihi 3 persen PDB, APBN tahun 2022 memiliki peran sentral dalam proses konsolidasi menuju defisit di bawah 3 persen terhadap PDB pada tahun 2023. Pemerintah



## Postur APBN 2022

### Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

Uraian	APBN 2022 (triliun Rupiah)
A. Pendapatan Negara	1.846,1
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.845,6
1. Penerimaan Perpajakan	1.510,0
2. PNBPN	335,6
II. Penerimaan Hibah	0,6
B. Belanja Negara	2.714,2
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.944,5
Belanja K/L	945,8
Belanja Non K/L	998,8
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	769,6
1. Transfer ke Daerah	701,6
2. Dana Desa	68,0
C. Keseimbangan Primer	(462,2)
D. Surplus/(Defisit) Anggaran	(868,0)
% Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB	(4,85)
E. Pembiayaan	868,0

merancang arah konsolidasi fiskal 2023 sebagai upaya pendisiplinan fiskal untuk penyehatan APBN. Hal tersebut penting dilakukan agar keberlanjutan fiskal sebagai komponen pemulihan jangka menengah-panjang tetap terjaga.

Pemerintah berupaya untuk menurunkan defisit melalui peningkatan penerimaan negara secara bertahap dan pengendalian belanja negara. Defisit anggaran yang tahun 2021 direncanakan sekitar 5,7 persen PDB akan diturunkan menjadi 4,85 persen pada 2022. Sementara, rasio perpajakan 2022 diperkirakan pada kisaran 8,37-8,42 persen terhadap PDB.

Dalam wawancara dengan Media Keuangan pada Juni 2021 lalu, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengharapkan pemerintah memiliki level of confidence yang tinggi. Ia meminta pemerintah untuk -optimis tetapi tetap realistis dalam mencapai target penerimaan pajak yang disepakati. Dengan demikian, shortfall pajak yang besar untuk menjaga kinerja postur APBN secara keseluruhan dapat terhindarkan.

Menurutnya, pemerintah hendaknya sudah memiliki manajemen risiko, disiplin fiskal, serta extra effort yang terukur dalam mengantisipasi setiap perubahan situasi di 2022. “Sehingga, tidak perlu lagi menambah defisit yang sudah menjadi beban anggaran yang relatif besar. Agar kredibilitas dan keberlanjutan APBN 2022 tetap terjaga dengan baik,” ucap Said.

Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Piter Abdullah Redjalum. Ia melihat ruang fiskal yang ada masih dapat lebih dioptimalkan untuk menanggulangi pandemi dan menyelamatkan para pelaku ekonomi.

“Jangan dibebani dengan upaya untuk menahan jangan sampai defisitnya melonjak terlalu tinggi. Karena kalau tantangan kita ditambah, di satu sisi kita harus menanggulangi pandemi juga menyelamatkan perekonomian, kemudian juga menjaga fiskal dengan sangat ketat, ruang kita menjadi sangat sempit, kita menjadi sangat tidak leluasa untuk melakukan sesuatu,” ungkap Piter.

#### Proyeksi pertumbuhan 5,0-5,5 persen

Dalam APBN 2022, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0-5,5 persen. Febrio Kacaribu menjelaskan target tersebut merupakan refleksi dari berbagai dinamika perekonomian nasional, baik dari arah pemulihan yang terjadi, maupun ketidakpastian yang masih tinggi. Menurutnya, kinerja ekonomi pada tahun 2022 diprediksi akan mampu melanjutkan momentum pemulihan yang terjadi secara kuat dan merata.

Febrio mengungkapkan, risiko ketidakpastian memang masih sangat tinggi akibat perkembangan kasus pandemi COVID-19 dan munculnya varian virus baru di berbagai belahan dunia. Oleh sebab itu, upaya pengendalian pandemi yang komprehensif akan menjadi prioritas pemerintah. Kemampuan adaptasi masyarakat untuk terus menerapkan disiplin protokol kesehatan juga akan sangat penting dalam memitigasi risiko ketidakpastian tersebut.

Tantangan lain yang dihadapi dalam pemulihan ekonomi nasional yakni fenomena laju pemulihan ekonomi yang tidak seragam antarnegara atau uneven recovery dan tren kebijakan stimulus

ekonomi di negara maju. Fenomena tersebut berpotensi mempengaruhi sektor keuangan pada negara berkembang seperti Indonesia.

“Untuk itu, sinergi otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan semakin diperkuat guna menghasilkan bauran kebijakan yang efektif memperkuat stabilitas sistem keuangan dalam negeri,” tegas Febrio.

Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEB UI) Teuku Riefky menilai asumsi makro yang diusulkan pemerintah sudah realistis. Komponen belanja APBN juga sudah berfokus ke pos-pos anggaran yang produktif.



Untuk itu, sinergi otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan semakin diperkuat guna menghasilkan bauran kebijakan yang efektif memperkuat stabilitas sistem keuangan dalam negeri”

Namun demikian, ia menegaskan optimisme ini perlu dibarengi dengan kewaspadaan. Pandemi menjadi variabel penentu kondisi perekonomian. Pemerintah perlu menyiapkan contingency atau backup plan jika kondisi pandemi lebih buruk dari perkiraan.

Selain itu, tahun 2022 adalah tahun terakhir defisit APBN di atas 3 persen. Menurut Riefky kondisi ini bagai pisau bermata dua terutama di tengah kondisi yang belum pulih. Begitu juga dengan penerimaan yang dikejar ketika kondisi belum pulih akan berdampak pada sektor riil.

“Namun demikian, selama kebijakan mengejar defisit ini tidak memotong belanja

yang penting maka tidak masalah. Jika berbicara soal penerimaan, sebetulnya itu akan mengikuti proses recovery. Jadi, kalau kita pulih, pasti penerimaan akan naik. Jika belum recover kita kejar maka akan menekan produktivitas dan ekonomi sektor riil,” tambahnya.

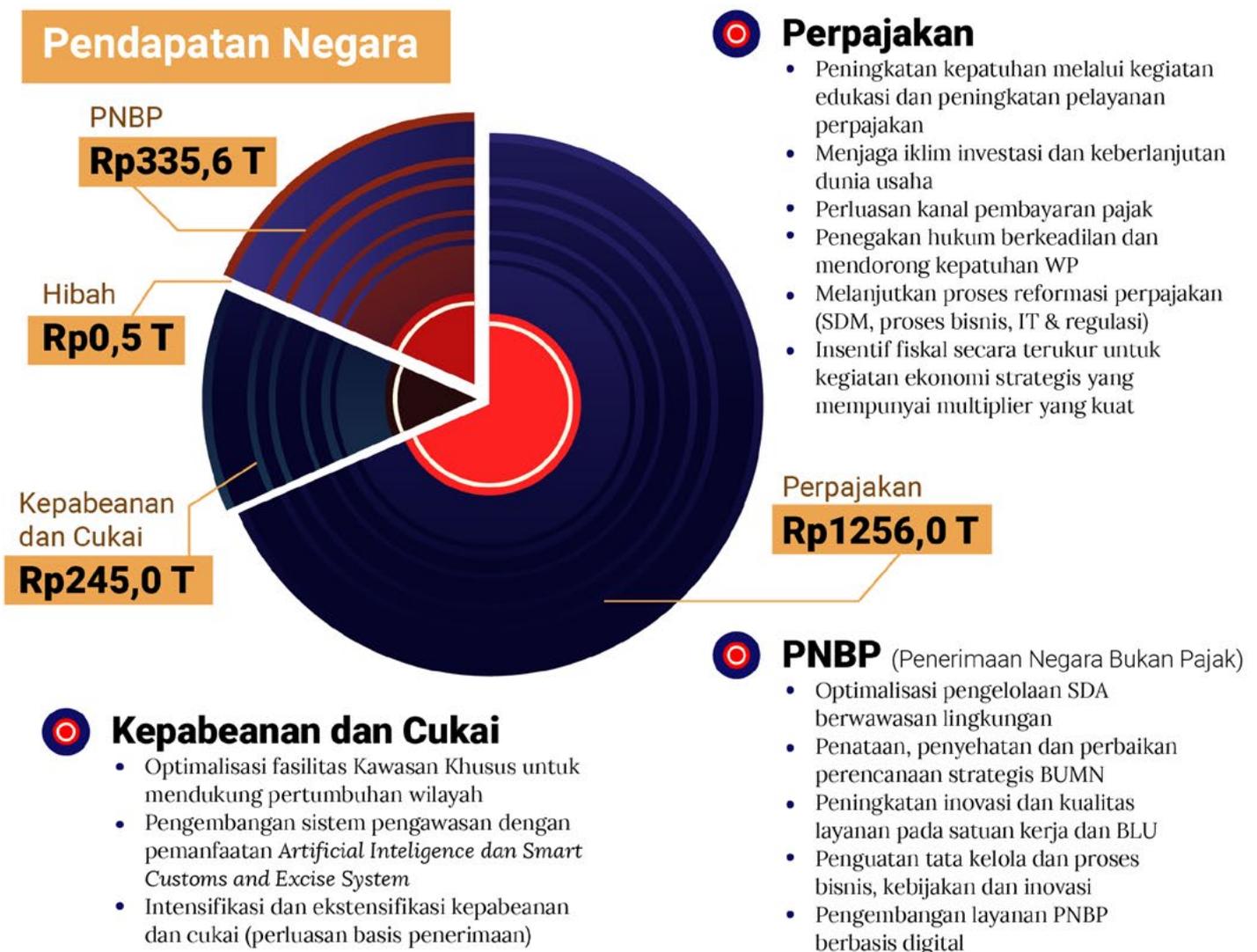
Pada tahun 2022, diperkirakan COVID-19 sudah lebih terkendali dengan berbagai langkah penanganan sistematis dan program vaksinasi yang digencarkan di seluruh wilayah Indonesia. Meski demikian, sebagian besar ahli memprediksi virus COVID-19 akan menjadi endemi. Oleh karenanya, masyarakat harus siap menjalani pola kebiasaan baru atau living with endemics. Pengendalian pandemi dan endemi akan menopang kinerja ekonomi untuk tetap tangguh dan antisipatif.

Saat ini APBN 2022 telah didesain lebih responsif, antisipatif, dan fleksibel sesuai perkembangan COVID-19 dan kondisi ekonomi. Pemerintah yang tanggap dan masyarakat yang disiplin protokol kesehatan menjadi kunci teratasnya pandemi dan pulihnya ekonomi.

# APBN 2022:

## Responsif, Antisipatif dan Fleksibel Merespon Ketidakpastian

Dinamika pandemi *coronavirus disease (Covid-19)* yang cukup tinggi berdampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen kebijakan fiskal bekerja keras menahan laju tekanan terhadap perekonomian dampak pandemi dari resesi ekonomi yang lebih dalam. Memasuki tahun 2022, APBN dirancang agar tetap fleksibel dengan memperhatikan faktor ketidakpastian yang masih ada.



## Belanja Negara:

Dari total **Rp2.714,2 T** belanja negara tahun 2022 dialokasikan untuk:

- **Belanja 82 Kementerian/ Lembaga sebesar Rp945.8 T**
  - Melanjutkan pemulihan ekonomi, reformasi kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
  - Memperkuat sinergi antarK/L, Pemda dan instansi lainnya.
  - Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas belanja yang efisien, efektif, dan produktif
- **Transfer ke Daerah/ Dana Desa sebesar Rp769,6 T**
  - Percepatan pemulihan ekonomi di desa dan penanggulangan kemiskinan ekstrim pada 212 kabupaten/kota prioritas
  - Penggunaan Dana Otsus Papua dan Papua Barat sesuai ketentuan UU No. 2 Tahun 2021 untuk mendorong penyediaan sarpras di sana.
  - Meningkatkan kualitas SDM pendidikan, kesehatan dan infrastruktur publik daerah.
  - Percepatan belanja daerah melalui transfer berbasis kinerja sesuai penyerapan anggaran dan sinergi penganggaran pusat dan daerah

### Anggaran Kesehatan mencapai **Rp255,4 T**



Belanja Pem. Pusat  
**Rp188,5 T**

- Lanjutan Penanganan Covid-19, a.l. program Vaksinasi, perawatan pasien, testing & tracing, obat, insentif nakes
- Reformasi Sistem Kesehatan, melalui transformasi pada layanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan teknologi informasi kesehatan
- Percepatan penurunan stunting
- Kesenambungan Program JKN

### Anggaran Perlinsos mencapai **Rp431,5 T**



Belanja Pem. Pusat  
**Rp402,7 T**

- Melanjutkan Penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan menyinergikan dengan berbagai data terkait.
- Mendukung Reformasi Perlinsos secara bertahap dan terukur.
- Mendukung Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- Peningkatan kualitas implementasi program perlinsos dan pengembangan skema perlinsos adaptif.
- Melanjutkan Program Perlinsos melalui Bantuan Sosial dan Subsidi.

### Anggaran Pendidikan mencapai **Rp542,8 T**



Belanja Pem. Pusat  
**Rp182,8 T**

- Peningkatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, antar K/L.
- Penguatan penyelenggaraan PAUD.
- Peningkatan kompetensi & profesionalisme guru.
- Meningkatkan perhatian kepada guru honorer.
- Penguatan pendidikan karakter bangsa.
- Penguatan dukungan penyelenggaraan pendidikan agama.
- Pemerataan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
- Penguatan pendidikan vokasi.

laporan khusus

Oleh: CS. Purwowidhu

# UU HPP: Tonggak Sejarah Baru Reformasi Perpajakan

*UU HPP lahir sebagai tonggak sejarah baru reformasi perpajakan yang mendorong terwujudnya sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Gagasan Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tersebut bukannya serta merta menjelma begitu saja di tengah pandemi. Beleid tersebut merupakan kelanjutan dari reformasi yang sudah dilakukan selama ini.*

Presiden Joko Widodo resmi mengundang Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 pada 29 Oktober 2021. Sebelumnya, pemerintah bersama DPR telah menyetujui RUU HPP untuk disahkan menjadi UU pada 7 Oktober 2021.

Setelah reformasi perpajakan fundamental diterapkan pada 1983, sistem perpajakan terus beradaptasi dengan kondisi perekonomian global dan domestik demi menyokong APBN untuk menyejahterakan rakyat. Krisis ekonomi 1998 menjadi titik tolak perubahan berikutnya yang kemudian berlanjut dalam beberapa periode reformasi perpajakan yakni Reformasi Pajak Jilid I (2002-2008), Reformasi Jilid II (2009-2014), serta Reformasi Jilid III (2016-2020).

“Pertanyaannya kemudian, kalau sudah sebanyak itu yang kita lakukan, kenapa masih perlu reformasi lagi? Ternyata masih banyak yang tersisa. Pertama, sistem pajak kita equality-nya belum perfect. Yang kedua, kita melihat PPN sebagai sistem yang berlaku saat ini masih banyak distorsi. Kemudian dari sisi pajak internasional, kita melihat tren ekonomi global berputar dengan sangat cepat. Ada perubahan pola bisnis, digital, dan ada komitmen antarnegara mengurangi base erosion dan profit shifting. Nah, tentu ini membutuhkan langkah-langkah baru lagi,” jelas Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Aرسال panjang lebar.

### Tetap perhatikan rakyat kecil

Tak lebih dari 4 bulan sejak draf RUU HPP diserahkan ke DPR, RUU tersebut akhirnya resmi menjadi UU. Perjalanan persetujuan pengesahan RUU HPP bukannya tanpa aral. Rencana revisi sistem pengenaan PPN yang menjadi bagian RUU HPP misalnya sempat menimbulkan kontroversi

di ruang publik. Kala itu isu pengenaan PPN atas barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan meramaikan diskursus publik.

Pengesahan UU HPP di tengah pandemi memiliki tantangan tersendiri. Namun Pemerintah dan DPR mempertimbangkan segala masukan masyarakat dan pemangku kepentingan. Seraya memastikan reformasi perpajakan

“Ini semua ditujukan agar Indonesia ekonominya bisa bertransformasi menuju ekonomi dimana nilai tambah terjadi di Indonesia, produktivitas dan daya saing masyarakat meningkat, dan tentu dengan itu kemakmuran serta pemerataan bisa tercapai.”

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Sosialisasi UU HPP di Bandung (17/12/21).

akan dilangsungkan dengan tetap menjaga kondisi masyarakat dan dunia usaha. Utamanya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar tidak terbebani dengan penerapan beleid tersebut.

UU HPP merevisi beberapa ketentuan yang diatur dalam beberapa UU perpajakan, mulai dari UU Pajak Penghasilan (UU PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), UU Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), UU Cukai. Di samping itu, UU HPP juga mengatur Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PPSWP) dan memperkenalkan Pajak Karbon.

### Menakar keseimbangan dan peluang

Di antara berbagai isu krusial di dalamnya, UU HPP merevisi sistem pajak pertambahan nilai (PPN) yang selama ini dinilai memiliki banyak kelemahan. Pengecualian PPN yang selama ini berlangsung menurut Yon Aرسال berdampak terhadap ekonomi, sosial, maupun penerimaan negara. Dari sisi ekonomi, terjadi distorsi ekonomi, misalnya harga produk dalam negeri tidak dapat bersaing dengan produk impor. Pemungutan pajak pun menjadi tidak efisien sebab penataannya lebih kompleks. Dari sisi sosial, sistem PPN yang berlaku saat ini kurang memberikan rasa keadilan lantaran distribusi beban pajak yang belum seimbang.

Sedangkan dari sisi penerimaan, potensi penerimaan pajak menjadi berkurang karena belanja perpajakan (tax expenditure) cukup tinggi. Fasilitas PPN mendominasi belanja perpajakan setiap tahunnya. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar berpendapat hal tersebut menyebabkan menurunnya potensi penerimaan pajak.

“Di tahun 2019, ada sebesar Rp257 triliun, besar banget, setara 1,62 persen dari PDB. Jadi besar banget belanja perpajakan kita, dan ini yang menyebabkan mengapa tax ratio kita tertekan,” beber Fajry.

Sementara pada 2020 belanja perpajakan PPN mencapai Rp140,4 triliun atau sekitar 60 persen dari total belanja perpajakan sebesar Rp234,9 triliun.

Upaya perbaikan sistem PPN dalam UU HPP dilakukan dengan mengatur perluasan basis PPN melalui pengurangan pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran, namun tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan dunia usaha.

Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial dan beberapa jenis jasa lainnya, diberikan fasilitas pembebasan PPN. Sehingga meskipun merupakan barang dan jasa kena pajak, masyarakat berpenghasilan kecil dan menengah tetap tidak akan membayar PPN atas konsumsi barang dan jasa tersebut sebagaimana yang berlaku saat ini.

Sementara itu, seiring dengan proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung, pemerintah dan DPR menyepakati kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen secara bertahap. Yaitu menjadi 11 persen mulai 1 April 2022 dan menjadi 12 persen paling lambat 1 Januari 2025.

Secara global tarif PPN di Indonesia pun masih relatif lebih rendah daripada rata-rata dunia sebesar 15,4%. Angka ini juga lebih rendah dari Philipina (12%), China (13%), Arab Saudi (15%), Pakistan (17%), dan India (18%).

Selain menjaga distribusi beban pajak yang adil bagi masyarakat, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan revisi sistem PPN juga ditujukan untuk

memanfaatkan potensi ekonomi ke depan.

Struktur demografi Indonesia saat ini relatif didominasi kelompok usia produktif. Tak hanya itu kelompok kelas menengah dengan proporsi konsumsi cukup besar juga terus bertumbuh. PPN merupakan pajak atas konsumsi masyarakat sehingga kapitalisasi peluang melesatnya konsumsi tersebut penting untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi ke depan.

### Cipta rasa keadilan

UU HPP tak hanya berfokus pada peningkatan penerimaan negara melalui pelebaran basis pajak, namun juga mengedepankan keadilan dalam pemungutan pajak terutama melalui kluster pajak penghasilan (PPh). Adil berarti memberi kepastian perlakuan pemajakan, mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak, dan menciptakan keseimbangan beban pajak antarkelompok pendapatan dan antarsektor. Pemungutan pajak dikatakan adil apabila setiap orang membayar pajak sesuai kemampuannya.

“Itu yang menjadi kata kunci sebenarnya. Kita menciptakan keadilan dan tidak semata-mata hanya penerimaan negara,” tegas Yon lantang.

UU HPP memperbaiki progresivitas tarif PPh Orang Pribadi (OP). WP OP yang berpenghasilan

## Pengaturan Pajak Dalam UU HPP

### Kelompok KUP, antara lain:

1. Pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP).
2. Pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) selama DJP belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP).
3. Sinkronisasi dengan UU Cipta Kerja dalam penerapan sanksi administrasi perpajakan.
4. Pengaturan asistensi penagihan pajak global.
5. Sinergi antar-instansi pemerintah untuk melakukan pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sama.

### Kelompok PPh, antara lain:

1. Pemberian dalam bentuk natura yang dapat dibayarkan.
2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta.
3. Pengaturan kembali penyusutan dan amortisasi.
4. Pemberlakuan tarif PPh badan menjadi 22% mulai tahun pajak 2022.
5. Perubahan lapisan dan tarif penghasilan kena pajak

### Kebijakan dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

### Kebijakan dalam Pengenaan Pajak Karbon

rendah akan menikmati penurunan tarif dari sebelumnya 15 persen menjadi 5 persen dengan kata lain beban PPh menurun. Ini dikarenakan lapisan penghasilan OP yang dikenai tarif PPh terendah 5 persen dinaikkan menjadi Rp60 juta dari sebelumnya Rp50 juta.

Pada saat bersamaan, penghasilan kena pajak (PKP) di atas Rp5 miliar, tarifnya dinaikkan dari 30 persen menjadi 35 persen. Hal ini tentunya selaras dengan prinsip kemampuan bayar atau gotong royong. Masyarakat yang berpenghasilan rendah dilindungi, sedangkan yang berpenghasilan tinggi membayar pajak yang lebih tinggi.



“UU HPP meningkatkan keberpihakan kepada WP UMKM. Hal ini dilakukan melalui pemberian insentif berupa batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atas peredaran bruto WP OP UMKM sampai Rp500 juta setahun. Artinya, WP OP UMKM yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta setahun tidak membayar PPh,”

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo.

UU HPP juga mengatur ulang perlakuan perpajakan atas pemberian natura/ kenikmatan (fringe benefit). Sebelum berlakunya UU HPP, penghasilan dalam bentuk natura tidak dikategorikan sebagai objek PPh. Dengan perubahan UU PPh melalui UU HPP, penghasilan dalam bentuk natura/ kenikmatan kini dikategorikan sebagai objek PPh, sama seperti penghasilan yang diterima dalam bentuk uang.

Pengaturan natura tersebut memberikan keadilan bagi seluruh penerima penghasilan. Setiap WP akan dikenakan pajak secara proporsional terhadap penghasilan yang mereka terima, terlepas dari bentuk penghasilan tersebut. Namun, ada pengecualian untuk beberapa hal yang diatur lebih lanjut seperti makanan dan minuman yang disediakan oleh pemberi kerja, pakaian atau seragam khusus yang disediakan karena sifat pekerjaannya yang mengharuskan, dan sebagainya.

Di sisi lain, pemberian natura tersebut dapat menjadi biaya dalam penghitungan pajak bagi perusahaan yang memberikannya. Dengan beban pajak lebih kecil, perusahaan dapat membangun

UU HPP akan menjadi modal kuat pemerintah dalam menjalani proses pemulihan ekonomi. (iStock)

“Kita optimistis dengan berbagai reformasi menyeluruh ini, mudah-mudahan tax ratio kita meningkat.”

Yon Arsal.



modal yang lebih kuat dan berkelanjutan. Di samping meminimalkan praktik penghindaran kewajiban perpajakan melalui shifting kewajiban dari pemilik perusahaan kepada pihak lainnya.

Selain memperbaiki progresivitas tarif PPh OP, UU HPP juga memberi dukungan bagi pelaku usaha UMKM baik orang pribadi maupun badan.

“UU HPP meningkatkan keberpihakan kepada WP UMKM. Hal ini dilakukan melalui pemberian insentif berupa batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atas peredaran bruto WP OP UMKM sampai Rp500 juta setahun. Artinya, WP OP UMKM yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta setahun tidak membayar PPh,” ungkap Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo.

Lebih lanjut, Suryo menerangkan WP Badan UMKM tetap mendapatkan fasilitas diskon tarif PPh 50% sesuai Pasal 31E UU PPh. Dukungan perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya tahan dan daya saing usaha UMKM di Indonesia.

Sementara dari sisi administrasi, perbaikan dilakukan antara lain dengan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk WP OP. Hal tersebut masuk ke dalam reformasi basis data kependudukan yang terintegrasi dan terpadu. Penggunaan NIK sebagai nomor identitas perpajakan tidak menyebabkan seseorang secara otomatis dikenai PPh. PPh hanya dikenakan apabila penghasilan yang diperoleh telah melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Integrasi data tersebut juga membantu pemerintah dalam menyalurkan bansos agar lebih tepat sasaran.

UU HPP juga mengatur ulang tarif PPh badan yang semula direncanakan untuk turun menjadi 20 persen mulai tahun 2022 menjadi tetap 22 persen. Tarif PPh Badan sebesar 22 persen dinilai sejalan dengan tren perpajakan global namun masih tetap kondusif dalam menjaga iklim investasi di Indonesia. Tarif ini pun masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata negara ASEAN (22,17%), OECD (22,81%), Amerika (27,16%), dan G-20 (24,17%).

### Hadir di momen yang tepat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam

konferensi pers RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Kamis (7/10/21) menjelaskan reformasi perpajakan urgen untuk meningkatkan rasio pajak (tax ratio) sehingga APBN dapat berkelanjutan.

“APBN harus sehat dan berkelanjutan dengan penerimaan negara yang memadai dan risiko APBN juga harus makin terjaga dan relatif manageable,” ujar Sri Mulyani Indrawati.

Tak dapat dipungkiri, rasio pajak Indonesia masih terbilang rendah bahkan jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Dalam kurun 2018-2020, rasio pajak Indonesia stagnan di level 10-12 persen. Sedangkan Singapura 13-14 persen, Malaysia 12-15 persen, Philipina 17-18 persen, dan Thailand 17-17,5 persen. Sementara Kementerian Keuangan mencatat saat ini rasio pajak Indonesia berada pada angka 8,4 persen.

Implementasi UU HPP diharapkan dapat mendongkrak rasio pajak dari 8,4 persen menjadi 9,4 persen pada 2024, bahkan mencapai 10 persen pada 2025. Peningkatan rasio pajak ini bisa terwujud melalui perluasan basis pajak yang diatur dalam UU HPP, terutama dalam pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN).

“Kita optimistis dengan berbagai reformasi menyeluruh ini, mudah-mudahan tax ratio kita meningkat,” ujar Yon.

Di samping rasio pajak, eksekusi agenda reformasi perpajakan pun semakin terdesak dengan ihwal pandemi Covid-19. Di tengah menurunnya setoran pajak seiring melemahnya aktivitas ekonomi, pengeluaran negara justru meningkat pesat dalam penanganan pandemi. Mulai dari belanja vaksin, bansos, hingga insentif pajak guna mendukung dunia usaha.

UU HPP akan menjadi modal kuat pemerintah dalam menjalani proses pemulihan ekonomi. Implementasi UU HPP bersama langkah reformasi fiskal dari sisi belanja dapat mendorong defisit agar kembali ke level maksimal 3 persen pada 2023 sebagaimana amanat UU 2/2020.

UU HPP hadir dalam momentum yang tepat untuk memperkuat reformasi perpajakan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan sukarela, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan. Semua itu untuk mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan sebagai fondasi menuju Indonesia Maju 2045.

laporan khusus

Oleh: Yani Kurnia Astuti

# Mengolah Potensi Ekonomi Syariah



*“Kinerja perbankan syariah jauh lebih baik daripada yang konvensional”, ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada acara 5th Annual Islamic Finance Conference (AIFC). Fakta ini tentu saja bagai oase di tengah pandemi.*

Di tengah situasi yang tidak mudah, ekonomi syariah nyatanya mampu bertahan bahkan lebih unggul. Besarnya potensi ekonomi syariah di Indonesia dan praktik ekonomi yang sehat terus mendorong pemerintah mengembangkan sektor ini secara tak putus.

### **Menggenjot Potensi Pasar**

Cita-cita menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia telah dimulai dengan beberapa puluh tahun lalu dengan menyasar industri perbankan. Perjalanan kebaikan ini terus berlangsung dan berlanjut dengan membidik sektor-sektor lain seperti sektor keuangan sosial syariah, industri halal, obligasi syariah, serta mendorong pengembangan sektor riil.

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar memiliki potensi pasar yang besar, namun sayangnya belum tergarap optimal. Menurut Kepala Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Wempi Saputra, ekonomi syariah bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Contohnya dalam konteks industri produk halal. “Untuk teman-teman ketahui, eksportir besar produk halal di dunia itu justru Brazil dan negara-negara lain yang populasi muslimnya tidak sebesar Indonesia”, ujarnya.

Di balik potensi Indonesia yang terbuka lebar, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Anwar Bashori berpendapat bahwa transformasi ekonomi dan keuangan syariah nasional perlu lekas dipercepat agar Indonesia tidak sekadar menjadi target pasar. Menurut Anwar posisi Indonesia sebagai sepuluh besar global player di sektor industri halal pada 2020 dapat terus ditingkatkan melalui fokus kebijakan pengembangan ekonomi syariah pada skala nasional, maupun dengan dukungan peningkatan investasi luar negeri. “Selain memenuhi kebutuhan pasar domestik, Indonesia juga harus mampu menyasar pasar ekspor,” tuturnya. Peluang inilah yang kemudian mendorong Indonesia mengoptimalkan peran dari kegiatan ekonomi syariah melalui program-program dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS.

### **Empat Pilar**

Pencanangan titik awal untuk memposisikan Indonesia sebagai salah satu pelaku utama dan hub ekonomi syariah dunia dilakukan dengan peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) pada bulan Mei 2019. MEKSI adalah pedoman lanskap ekonomi syariah nasional yang paling terkini. Terdapat 4 (empat pilar) yang diturunkan dari MEKSI yakni Pengembangan Industri Produk Halal, Pengembangan Industri Keuangan Syariah, Pengembangan Dana Sosial Syariah, serta Pengembangan dan Perluasan Kegiatan Usaha Syariah.

Pengembangan Industri Produk Halal disiapkan KNEKS melalui beberapa program di antaranya kodifikasi data industri produk halal, masterplan industri produk halal, pembentukan taskforce lintas K/L untuk percepatan implementasi sertifikasi halal bagi Usaha Menengah Kecil (UMK), serta riset dan inovasi produk halal berbasis teknologi. Lebih lanjut Wempi menjelaskan bahwa untuk pengembangan dana sosial syariah, KNEKS telah meluncurkan dua program yaitu transformasi pengelolaan wakaf uang nasional serta transformasi digital dan sustainabilitas. “Pada 25 Januari 2021, diluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang yang merupakan platform alternatif untuk membuka dana sosial bagi masyarakat. Jadi, bukan untuk pemerintah, tetapi dari masyarakat untuk masyarakat”, teranginya.

### **Membidik Industri Halal**

Konsep halal memang dulu hanya lekat dengan muslim. Namun, seiring berjalannya waktu konsep halal semakin inklusif. Halal sudah menjadi bagian dari gaya hidup sehat terutama untuk sektor industri makanan dan minuman. Saat ini, industri halal tidak hanya diperuntukkan bagi para muslim tetapi juga untuk seluruh masyarakat. “Produk halal tidak hanya untuk muslim. Halal itu baik dari sisi kualitas dan higienisnya. Jadi, halal bukan lagi eksklusif untuk muslim tetapi inklusif untuk semua kalangan konsumen,” jelas Afdhal Aliasar, Direktur Industri Produk Halal, KNEKS.

Pandemi justru membawa berkah dalam meningkatkan potensi sektor halal. “Setelah pandemi, tren halal healthy food meningkat drastis karena diyakini dapat meningkatkan

imunitas,” jelas Sapta Nirwandar, Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center. Di masa pandemi COVID-19, industri produk halal masih mampu mencatatkan kinerja positif. Di tengah tekanan, industri ini tercatat mengalami pertumbuhan lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2019. “Secara global pengeluaran untuk produk-produk halal 2019 sebelum Covid terjadi terutama untuk produk makanan, farmasi, kosmetik, fashion, juga bidang travel. Seluruh pengeluaran-pengeluaran-pengeluaran produk tersebut mencapai secara global USD 2,02 triliun. Dan juga

mengalami pertumbuhan sebesar 3,2%. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2019 sebelum terjadinya COVID-19 yaitu sekitar 2,3%”, ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di acara Unilever Muslim Center of Excellence (April, 2021).

Hal ini memperlihatkan bahwa potensi pasar produk halal global sangat besar. Afdhal Aliasar, Direktur Industri Produk Halal, KNEKS, menyatakan bahwa posisi Indonesia cukup memimpin di sektor industri halal. Untuk produk makanan halal, Indonesia merupakan konsumen terbesar dengan konsumsi sebesar USD144 miliar di 2019. “Ini menjadi opportunity

kita untuk memproduksi produk halal. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang besar, tetapi juga kebutuhan internasional yang selalu meningkat dari tahun ke tahun,” tambahnya.

Dari beberapa sektor industri produk halal yang berkembang di Indonesia, Afdhal berpendapat sektor makanan minuman dan pariwisata adalah sektor prioritas yang dapat dikembangkan di tahun pemulihan ekonomi ini. “Sektor yang utama untuk industri halal adalah makanan minuman. Namun, jika bicara fokus salah satu pemulihan ekonomi nasional ke depan, kita ingin melihat pariwisata bisa bangkit dan melejit,” tutur Afdhal.

### Mempercepat Sertifikasi Halal

Sebagai wujud komitmen pemerintah untuk mendorong percepatan industri halal, pemerintah telah menetapkan dan menerbitkan tarif sertifikasi halal terbaru dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 57 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara



“Ini menjadi *opportunity* kita untuk memproduksi produk halal. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang besar, tetapi juga kebutuhan internasional yang selalu meningkat dari tahun ke tahun,”

Afdhal Aliasar, Direktur Industri Produk Halal, KNEKS



Halal bukan lagi eksklusif untuk muslim tetapi inklusif untuk semua kalangan konsumen. (iStock)

laporan khusus

Oleh: Dara Haspramudilla

# Serba-Serbi Presidensi G20 Indonesia 2022



*Indonesia mencetak sejarah. Pada sesi penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Roma yang berlangsung di Italia, 31 Oktober 2021, Indonesia resmi memegang amanah sebagai PRESIDEN G20. Mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger” Indonesia berkesempatan besar mengusung agenda prioritas agar wajah dunia menjadi lebih baik dan berubah arah.*

Presidensi G20 Indonesia adalah kali pertama sejak Indonesia bergabung di forum G20 di awal pembentukannya pada 1999. Berbeda dari kebanyakan forum multilateral, G20 tidak memiliki sekretariat tetap. Fungsi presidensi dipegang oleh salah satu negara anggota, yang berganti setiap tahun. Presidensi G20 merupakan suatu kepercayaan yang sangat besar dan merupakan bentuk pengakuan dunia internasional terhadap kepemimpinan Indonesia.

Group of Twenty atau G20 merupakan forum yang mempertemukan 20 negara



“Jika pertemuan dilakukan secara fisik maka akan terjadi peningkatan konsumsi domestik hingga Rp1,7 triliun, penambahan PDB nasional hingga Rp7,4 triliun, serta pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 33 ribu di berbagai sektor,”

Haryo Limanseto, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan,

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

dengan ekonomi terbesar di dunia. Anggota G20 menyumbang lebih dari 80 persen produk domestik bruto (PDB) global, 75 persen perdagangan global, dan 60 persen populasi global. Sinergi kebijakan dan kerjasama antara negara-negara G20 tersebut memiliki dampak yang sifatnya sistemik bagi stabilitas perekonomian dunia dan kemajuan pembangunan global.

Terlebih lagi, G20 merupakan forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU) yang merepresentasikan 60 persen populasi bumi, 75 persen perdagangan global, dan 80 persen PDB dunia. Tentu saja, kontribusi G20 terhadap penanganan masalah ekonomi di berbagai wilayah dunia amat signifikan.

G20 dianggap forum yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan global seperti krisis keuangan yang dimotori oleh negara-negara perekonomian terbesar di dunia. Berkaca pada situasi saat ini, tantangan global yang dihadapi adalah mengupayakan pemulihan ekonomi global bisa selaras, inklusif, dan lebih cepat. Sebagai bagian dari negara berkembang di G20, dengan memegang presidensi, Indonesia dapat mendorong

agenda-agenda yang dapat membantu negara berkembang keluar dari cengkeraman pandemi.

“Agenda tersebut misalnya bagaimana bantuan kepada negara-negara berkembang dan negara miskin, bagaimana penanganan kesehatan misalnya masalah vaksinasi, penyediaan obat-obat terapeutik, kemudian alat-alat diagnostik, itu juga dibantu di sana,” tutur Wempi Saputra, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional.



“Apalagi kalau kita lihat banyak negara maju yang mungkin sudah menganggap bahwa pemulihan ekonomi itu sudah di depan mata, jadi mereka berpikir lebih baik kita kembali lagi membicarakan agenda-agenda yang di luar dari krisis.

Yose Rizal Damuri, Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) dan Co-chair T20 Indonesia

Dalam jangka panjang dampak positif dari Presidensi G20 Indonesia akan membentuk branding yang positif.  
(Anas Nur Huda)

## Manfaat perhelatan G20 bagi Indonesia

Perhelatan internasional ini tentu saja tidak hanya akan membawa manfaat bagi negara-negara berkembang lainnya, tetapi juga bagi kepentingan domestik. Forum yang akan diselenggarakan selama setahun ke depan ini akan memberikan kontribusi baik dari aspek ekonomi, sosial budaya maupun branding Indonesia di mata dunia.

“Jika pertemuan dilakukan secara fisik maka akan terjadi peningkatan konsumsi domestik hingga Rp1,7 triliun, penambahan PDB nasional hingga Rp7,4 triliun, serta pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 33 ribu di berbagai sektor,” ungkap Haryo Limanseto, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Lebih dari itu, dalam jangka panjang dampak positif dari Presidensi G20 Indonesia akan membentuk branding yang positif. Dengan memegang Presidensi G20, saat ini Indonesia akan menjadi sorotan dunia. Harapannya, kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia akan semakin meningkat yang kemudian diharapkan dapat mendorong komitmen investasi dari anggota G20 dan organisasi internasional.

## Pulih bersama, bangkit perkasa

Tema yang diusung Indonesia dalam presidensinya yakni Recover Together, Recover Stronger atau diterjemahkan menjadi Pulih Bersama, Bangkit Perkasa. Tema ini merupakan upaya Indonesia menyampaikan pesan kepada dunia bahwa pemulihan ekonomi global dalam situasi pandemi harus dilakukan bersama-sama. Indonesia ingin agar semua negara mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, pesan mengenai resiliensi juga terkandung dalam tema tersebut. Dengan demikian, semua negara anggota dapat melakukan monitoring bersama untuk menguatkan resiliensi perekonomian global. Tidak hanya itu, program-program yang dilakukan untuk mendorong produktivitas negara lain selain anggota G20 juga disiapkan, termasuk di dalamnya

program bersama untuk membantu negara-negara miskin dalam penanganan utang.

Menurut Yose Rizal Damuri, Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) dan Co-chair T20 Indonesia, tema Presidensi G20 Indonesia dinilai sudah selangkah lebih maju dibanding tema yang diangkat dalam pertemuan G20 di Italia 2021. Namun demikian, ia beropini bahwa tantangan yang akan dihadapi Indonesia adalah dalam berupaya menjaga fokus dan mendorong agenda-agenda pembahasan untuk tetap berada pada jalur pembahasan mengenai pemulihan dan krisis.

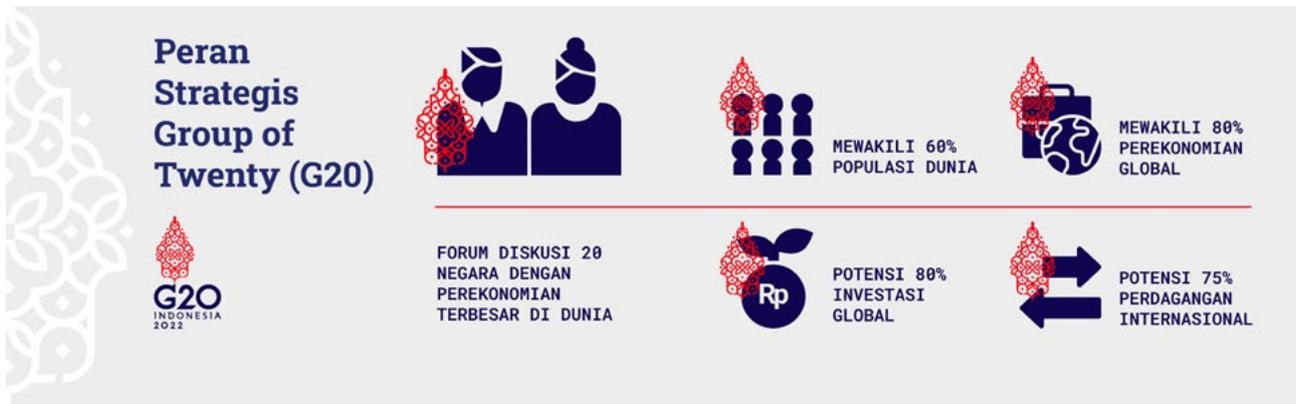
“Apalagi kalau kita lihat banyak negara maju yang mungkin sudah menganggap bahwa pemulihan ekonomi itu sudah di depan mata, jadi mereka berpikir lebih baik kita kembali lagi membicarakan agenda-agenda yang di luar dari krisis. Padahal banyak negara berkembang dan negara miskin yang bahkan belum mampu menyelesaikan permasalahan kesehatan dengan baik,” terang Yose.

Dalam pertemuan G20 nanti akan ada lebih dari 150 pertemuan baik dari tingkat kepala negara, menteri, deputi hingga kelompok kerja sebelum nantinya akan menuju pada puncak acara yaitu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT G20) atau Summit. Pembahasan dalam Forum G20 ini akan terbagi ke dalam dua jalur yakni Jalur Keuangan (Finance Track) dan Jalur Sherpa (Sherpa Track).

## Jalur sherpa: fokus pada tiga isu prioritas

Istilah Sherpa memang lekat dengan pendakian gunung Himalaya. Suku Sherpa adalah pemandu para pendaki yang juga membantu sebagai porter dan juru masak. Penamaan Jalur Sherpa memang terinspirasi dari Suku Sherpa yang merefleksikan bagaimana para Sherpa G20 membuka jalan menuju KTT atau Summit.

Maka, tak heran jika Pertemuan Pertama Tingkat Sherpa G20 menjadi pertemuan awal yang membuka rangkaian pertemuan pada Forum G20. Diselenggarakan pada 7 Desember 2021, pertemuan ini dihadiri 38 delegasi yang merupakan perwakilan dari 19 negara anggota G20, 9 negara undangan serta 10 organisasi internasional. Pembahasan pada Jalur Sherpa akan



“Kita juga sudah mulai mengidentifikasi sejumlah sektor yang diharapkan bisa *key deliverables* Indonesia, antara lain penguatan sektor kesehatan global, digitalisasi, transisi energi, kemudian *financial inclusion*, termasuk hal-hal lain seperti *green infrastructure*, *financing for development*, dan lainnya, termasuk inklusif development yang memberikan kesetaraan misalnya bagi penyandang disabilitas, bagi kaum-kaum yang masih rentan, dan sebagainya,”

Hari Prabowo, Direktur Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri.

dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan Kementerian Luar Negeri.

Pada Jalur Sherpa, isu-isu ekonomi nonkeuangan didiskusikan, termasuk di dalamnya energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan, hingga

perubahan iklim. Dari semua isu tersebut, ada tiga prioritas agenda yang difokuskan oleh Indonesia yakni kesehatan dunia yang lebih kuat, transisi energi, dan transformasi digital.

“Kita juga sudah mulai mengidentifikasi sejumlah sektor yang diharapkan bisa key deliverables Indonesia, antara lain penguatan sektor kesehatan global, digitalisasi, transisi energi, kemudian financial inclusion, termasuk hal-hal lain seperti green infrastructure, financing for development, dan lainnya, termasuk inklusif development yang memberikan kesetaraan misalnya bagi penyandang disabilitas, bagi kaum-kaum yang masih rentan, dan sebagainya,” terang Hari Prabowo, Direktur Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri.

### Jalur keuangan: usung enam agenda prioritas

Sementara itu, Jalur Keuangan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia memiliki enam agenda ekonomi prioritas. Pertama, exit strategy sebagai strategi jangka pendek. Dalam agenda ini akan dibahas mengenai normalisasi kebijakan yang dilakukan beberapa negara terutama negara maju yang berdampak bagi negara berkembang yang masih tertinggal atau belum bisa melakukan kebijakan serupa. G20 akan mendorong agar seluruh negara anggota bisa bersama-sama ketika melakukan kebijakan exit strategy mereka dan mempertimbangkan dampaknya untuk negara lain.

Kedua, mengatasi scarring effect atau luka parut yang merupakan strategi jangka menengah dan panjang. Pandemi Covid-19 berdampak dalam jangka panjang terhadap fundamental dan struktural perekonomian dunia. Tidak semua sektor bisa segera pulih. Untuk itu, akan dibahas

bagaimana cara membantu sektor-sektor yang terdampak sangat dalam agar bisa segera pulih.

Agenda ketiga adalah mengenai sistem pembayaran di era digital. Pandemi membawa hikmah yakni terakselerasinya sistem pembayaran digital. Momen ini akan dimanfaatkan untuk membenahi dan mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan digital dengan bekerja sama secara global membuat sistem pembayaran cross border yang semakin efisien, aman dan reliable.

Keuangan berkelanjutan atau sustainable finance menjadi agenda prioritas keempat. Agenda ini akan fokus mendorong perkembangan isu manajemen keuangan yang bisa membiayai proyek yang dapat mengatasi climate change. Seiring dengan itu, kita juga akan membahas bagaimana meningkatkan kemampuan semua negara untuk melakukan transisi kepada perekonomian hijau.

Agenda prioritas kelima adalah inklusi keuangan atau financial inclusion. Pembahasan akan mengarah pada penguatan aspek digital, di mana teknologi digital dimanfaatkan untuk mempercepat proses inklusi keuangan untuk sektor-sektor yang memang rentan, seperti UMKM.

Terakhir adalah agenda perpajakan internasional. Agenda ini sangat penting sebab semua negara dalam masa pemulihan ekonomi, begitu juga fiskalnya. Maka, sistem perpajakan internasional yang sederhana dan adil menjadi sangat penting apalagi di era digital banyak perusahaan digital yang beroperasi melintasi batas negara dan wilayah yurisdiksi.



RECOVER TOGETHER  
RECOVER STRONGER



potret kantor

Oleh: Aditya Wirananda

# Perkara-perkara Nyata yang Kerap Terlupa

*Seperti nyamuk, satu ditepuk datang setumpuk. Berbagai perkara di berbagai penjuru negeri seolah tiada mati. Mulai kondisi geografis, kesenjangan sosial, ekonomi, bahkan tindak kriminal. Di titik-titik perbatasan negara, sejumlah usaha penyelundupan nyaris tak pernah libur. Dari logistik harian sampai barang haram. Meski sebagian besar dilandasi niat mengelabui, sebagian kecil sisanya dilatarbelakangi keterbatasan referensi.*

Tugas-tugas mengamankan keuangan negara, baik pengawasan, penagihan pajak, penilaian aset, penyaluran dana, atau yang lain seringkali menyisakan cerita yang bikin sesak. Belum lagi tentang bertahan hidup, bermukim, dan hal-hal manusiawi lainnya.

#### Mengamankan Perbatasan

Di Jagoi Babang, kecamatan yang jadi perlintasan Indonesia-Malaysia, keluar masuk barang lebih didominasi barang kebutuhan sehari-hari. Sebagian penyelundupan yang terjadi, seringkali lebih dilatarbelakangi ketidaktahuan masyarakat atas regulasi yang ada. Umumnya, komoditas yang melintasi Jagoi Babang adalah minuman beralkohol dan barang bekas. Penegahan barang bekas, menurut Junanto Kurniawan, Kepala Bea Cukai Jagoi Babang terbilang salah satu yang merepotkan. “Begitu menegah lelong ini, kami kesulitan melakukan penyimpanannya. Untuk pemusnahan pun tidak mudah,” ujarnya.

Sementara di Batam, lalu lintas barang didominasi komoditas ekspor impor mulai

“Kalau kita nangkap (narkoba) sekarang (dengan satuan) gram, atau satu kilo dua kilo, itu sudah hal biasa dan sering.”

Ambang Priyonggo, kepala KPUBC Batam

dari produk manufaktur sampai perkebunan. Namun demikian, sebagai kawasan dengan lalu lintas tinggi, penyelundupan barang haram jadi menu setiap hari di Batam. Ambang Priyonggo, kepala kantor Bea Cukai Batam, “kalau kita nangkap sekarang (dengan satuan) gram, atau satu kilo dua kilo, itu sudah hal biasa dan sering.” September silam, bersama-sama dengan Kanwil Bea Cukai Tanjung Balai Karimun dan Polri, Bea Cukai Batam berhasil menegah 107 kilogram narkoba jenis sabu-sabu.

Tugas-tugas pelik bikin kantor ini terus berbenah. Selain peningkatan kapasitas pegawai, Bea Cukai Batam terus memutakhirkan sejumlah perangkat pengawasan yang dimiliki, seperti Coastal

Surveillance System (CSS), sejumlah kapal patroli, dan berbagai perangkat pengawasan lainnya.

#### Optimalkan aset negara

Lain peran, lain pula perjuangan. Pengelolaan aset negara punya cerita berbeda. Di Bukittinggi misalnya, sejumlah aset punya potensi untuk dioptimalkan. “Salah satunya adalah padang gembala. Padang gembala sapi yang sangat luas. Lokasinya itu di kabupaten Lima Puluh Kota,” ujar Hermawan Sukmajati, kepala KPKNL Bukittinggi. “Kata orang-orang, di sana itu seperti New Zealand-nya Indonesia,” lanjutnya. Padang gembala ini punya potensi tinggi untuk dijadikan destinasi wisata. Dari sana, pendapatan negara potensial meningkat pula.

Sementara di Sorong, lain lagi ceritanya. Wilayah kerja yang luas dan sejumlah keterbatasan fasilitas bikin para pegawai di sana tak jarang bermain nyali, terutama saat tugas penilaian aset. Indra Eka Putra, kepala KPKNL Sorong mengatakan salah satu lokasi aset terjauh berada di pulau Fani. Lokasinya sekitar 200 kilometer di sisi selatan

Republik Palau dan 200 kilometer dari daratan Sorong. “Kita kalau mau ke sana, (biaya) transportnya itu sampai 60 juta,” kata Indra.

#### Lokasi aset di wilayah

yang dapat dijangkau via jalur darat pun tak kalah menggoda nyali. Degix Luhukay, salah satu pegawai KPKNL Sorong bilang, salah satu yang tersulit adalah menuju aset berupa jalan nasional yang melintasi gunung Petik Bintang. Kondisi jalan di sana masih buruk. Sedangkan lokasinya berada di ketinggian lebih dari 1.000 mdpl. “Orang (Kementerian) PU bilang, kalau jatuh hari ini, mungkin minggu depan baru ketemu di bawah.”

#### Ihwal bertahan hidup

Tak semata tugas-tugas berat yang mesti dihadapi para pegawai Kementerian Keuangan di berbagai penjuru. Strategi bertahan hidup pun harus tidak bisa dipukul rata di tiap wilayah. Di



**Penilaian Aset** (Gbr. Kiri)  
Seorang pegawai KPKNL Sorong melakukan penilaian aset negara. (Dok. KPKNL Sorong)



**Customs Visit Customer** (Gbr. Kanan)  
Salah satu kegiatan KPPBC Bitung. (Dok. KPPBC Bitung)

Serui, para pegawai KPPN tidak bisa mudik sewaktu-waktu. Sebab, penerbangan dari Serui menuju kota besar terdekat tidak setiap hari tersedia. Hanya dua tiga kali dalam seminggu. Di Saumlaki, untuk menjangkau wilayah kabupaten yang sama, bahkan harus melalui

penerbangan ke ibukota provinsi lebih dulu. Itupun, tak setiap hari tersedia penerbangan.

Bagi pegawai di KPP Waingapu, bertahan hidup sehari-hari mungkin menyisakan cerita yang lebih baik. Namun, mereka harus siap sewaktu-waktu berhadapan dengan fenomena cuaca yang sewaktu-waktu bisa jadi petaka. Seperti pada pertengahan 2021, saat sejumlah wilayah di Sumba terendam banjir akibat cuaca ekstrem. Di KPPN Tarakan,

hidup seolah sama saja dengan di kota, tapi mencari hiburan bisa jadi cerita berbeda. Di sana, pergi memancing sama artinya dengan berbagi waktu waktu berjam-jam bersama buaya, bahkan kadang hiu.

“Orang (Kementerian) PU bilang, kalau jatuh hari ini, mungkin minggu depan baru ketemu di bawah.”

Degix Luhukay, pegawai KPKNL Sorong

# PAK MAMAN & JONO

PERKARA SKIN CARE, EKONOMI BISA PULIH LEBIH CEPAT





## Podcast Media Keuangan

Dengarkan serunya wawancara bersama para narasumber pilihan Media Keuangan

